



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BLULUK

Jalan Raya Bluluk-Sukorame Nomor 132, Bluluk, Jawa Timur 62274
Telepon (0322) 7710985 Pos-el bluluk_@Kab_lamongan.kab.go.id,
Laman www.lamongan.kab.go.id

Lamongan, 01 April 2026

Nomor : 470/ /413.302/2026
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan I Tahun 2026
Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di
LAMONGAN

Diampaiakan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan I Tahun
2026 Kecamatan Bluluk sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

**CAMAT BLULUK
KABUPATEN LAMONGAN**

M. EKO TRIPRASETYO, S. STP., M.KP.
Pembina
NIP. 19871003 200602 1 001

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.
-

**LAPORAN TRIWULAN I PENGELOLAAN RISIKO
KECAMATAN BLULUK KABUPATEN LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR
2026**



JALAN RAYA BLULUK-SUKORAME NOMOR 132, LAMONGAN
bluluk@lamongankab.go.id/kec.bluluk@gmail.com

62274



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BLULUK

Jalan Raya Bluluk-Sukorame Nomor 132, Bluluk, Jawa Timur 62274
Telepon (0322) 7710985 Pos-el bluluk_@Kab_lamongan.kab.go.id,
Laman www.lamongan.kab.go.id

NO DOKUMEN	:	470/ /413.302/2026
TANGGAL TERBIT	:	01 April 2026

Disiapkan Oleh	:	Pit. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan Bluluk SURATI, S.Sos. NIP. 19720925 199403 2 004
Diperiksa	:	Sekretaris Kecamatan Bluluk JUVITA NINGSIH, S.E., M.M. NIP.19780131 200312 2 003
Disahkan Oleh	:	Camat Bluluk M. EKO TRIPRASETYO, S. STP., M.KP. NIP.19871003 200602 1 001

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari faktor pertumbuhan dari suatu organisasi/perusahaan, entah bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Definisi risiko juga telah dikemukakan berbagai macam literatur, namun semuanya memiliki arti yang sama yakni ketidakpastian. Risiko juga dapat dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Risiko menurut SNI ISO 31000 adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran perusahaan atau organisasi yang bersifat negatif maupun positif, tetapi perlu ditindaki yaitu risiko yang berdampak negatif dikarenakan akan menjadi hambatan untuk mencapai sebuah sasaran maupun tujuan dalam perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.

Risiko dapat disebabkan faktor dari luar maupun faktor dari dalam yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Setiap bagian dalam organisasi memiliki risikonya tersendiri. Contohnya potensi risiko yang akan terjadi dalam organisasi pemerintah seperti risiko terjadi korupsi/kecurangan yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, penurunan pendapatan pajak, kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/pembangunan, kegagalan pemberian layanan yang optimal kepada masyarakat dan lain sebagainya.

Dalam memastikan tercapainya tujuan, maka risiko harus dikelola dengan baik. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampak yang terjadi sehingga tujuan dapat tercapai. Pengelolaan risiko dimulai dari upaya mengenali, mengukur mengevaluasi risiko hingga melaksanakan upaya penanganannya.

Pengelolaan risiko yang efektif akan membantu mengidentifikasi risiko mana yang menjadi ancaman terbesar bagi organisasi dan memberikan panduan untuk menanganinya. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu manajemen yang disebut dengan Manajemen Risiko.

Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, memantau dan mengelola risiko potensial untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya terhadap suatu organisasi.

Manajemen Risiko merupakan perangkat manajemen yang ditujukan untuk mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah. Manajemen risiko bertujuan meminimalkan kemungkinan terjadinya dan dampak risiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran tersebut.

Dengan diterapkannya manajemen risiko diharapkan dapat meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja, mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif, memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan ketahanan organisasi, dan meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi

risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar Risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Kecamatan Bluluk telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan I sebagaimana terlampir:

Formulir Kerja Pengumuman Pengaduan Ping Strangi							
Nama Petnis	Pemerintah Kabupaten Lampung						
Tahun Perencanaan	2024						
Tipe dan Waktu Periode							
Unit Kerja/Instansi	Lampung						
Struktur Organisasi	Kecamatan Bluluk						
No	Kegiatan Pengendalian yang Ditentukan	Media/Bentuk Laporan Pengumuman/Informasi	Pengedia Informasi	Penerima Informasi	Estimasi Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Kemungkinan
Salah Strategi BPR Kecamatan Bluluk:							
1	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait GDP	Media: Spanduk/Orasi Pemasangan Pamflet Desa	Orasi	Desa/RTK	Januari	Januari	-
2	Melaporkan secara berkala kebutuhan pelayanan publik	Media: Eselon/Orasi Pemasangan	Orasi	Desa/RTK	Januari	Januari	-
3	Melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan DSD	Media: RAB/GDP	Orasi	Desa/RTK	Januari	Januari	-
Salah Strategi BPR Kecamatan Bluluk:							
1	Melakukan monitoring/pelaksanaan/pengawasan secara real-time menggunakan aplikasi	RAB/GDP	Orasi	Desa/RTK Desa/RTK Desa/RTK	Januari	Januari	-
2	Melakukan verifikasi/evaluasi kinerja pelayanan/pengawasan/monitoring keuangan	Monitoring dan Evaluasi Keuangan	Orasi	Desa/RTK Desa/RTK Desa/RTK	Januari	Januari	-

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Kecamatan Bluluk telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I, yang telah dilaksanakan adalah:

1. Pengumpulan data dan koordinasi dengan desa
2. Melaporkan kepada Disdukcapil
3. Membuat pamflet tentang biaya pelayanan yang gratis

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Adanya hambatan dalam melakukan realisasi sehingga pengelolaan risiko tidak dapat dimaksimalkan sesuai dengan rencana kegiatan, berikut ini adalah adanya hal-hal yang menjadi hambatan di Kecamatan Bluluk :

1. Pada tahap pengumpulan data dan koordinasi dengan desa sering menghadapi berbagai hambatan, seperti data yang tidak lengkap atau kurang akurat akibat pencatatan yang belum tertib, perbedaan format data antar sumber, serta keterbatasan akses dan keterlambatan dalam memperoleh data dari pihak desa. Selain itu, koordinasi kerap

terhambat oleh komunikasi yang kurang efektif. Hal ini dapat berdampak pada citra Kecamatan Bluluk selaku penyedia layanan kependudukan.

2. Adanya perubahan spesifikasi yang diminta sehingga Kecamatan Bluluk harus menunggu sampai hal tersebut diverifikasi.
3. Kurangnya Koordinasi dan tidak lengkapnya data pendukung yang mengakibatkan terlambatnya pelaporan dan nilai yang didapatkan tidak maksimal.
4. Kualitas SDM perangkat desa yang belum memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi terkait pemenuhan administrasi desa serta sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga dapat menghambat pengadministrasian desa

B. MONITORING DAN RISIKO RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, terjadinya risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (~~diperlukan~~/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

IV. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan I dapat disimpulkan bahwa masih perlu dilakukan ketelitian administrasi pengadaan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan evaluasi terkait pengadaan agar tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.